

TESIS

**PENGGABUNGAN KELURAHAN PADA WILAYAH
KOTA PAYAKUMBUH DALAM RANGKA EFEKTIFITAS
PELAYANAN PUBLIK**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas**



OLEH :

ROMARIO PUTRA

1620112010

Dosen pembimbing:

- 1. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Khairani, SH., M.H.**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PENGGABUNGAN KELURAHAN PADA WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK

**Romario Putra, BP : 1620112010, Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 142 Halaman, Tahun 2020**

Pembimbing I Dr. Yuslim, S.H.,M.H., Pembimbing II Dr. Khairani, SH., M.H.

ABSTRAK

Pelaksanaan penataan Kelurahan sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan telah dijabarkan persyaratan minimal pembentukan Kelurahan seperti Jumlah penduduk, luas wilayah, akses dan fasilitas penunjang pemerintahan. Pemerintah Kota Payakumbuh dengan jumlah 76 Kelurahan dinilai terlalu banyak dan belum proporsional sehingga tidak maksimal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tingkat Kelurahan, namun disatu sisi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penataan Kelurahan belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri tersebut sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) bahwa Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sehingga diterbitkanlah Perda Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh, dimana pembentukan Kelurahan ditentukan melalui kajian yang tertuang dalam bentuk Scoring System. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana dampak penggabungan Kelurahan terhadap efektifitas pelayanan publik nantinya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, kuisioner dan studi dokumen yang diolah menggunakan teknik editing dan dianalisa secara kualitatif. Pembentukan Kelurahan di Kota Payakumbuh melalui scoring system menghasilkan 20 Kelurahan baru yang merupakan hasil kajian dan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan stakeholder terkait. Secara normatif, 20 Kelurahan baru hasil penggabungan ditemukan bahwa terdapat beberapa Kelurahan yang belum memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 31 tahun 2006 seperti jumlah penduduk yang masih dibawah 2000 jiwa dan luas wilayah yang masih dibawah 5 Km², selain itu proses penggabungan nantinya akan dilihat dari perspektif aturan perundang-undangan yang terbaru. Di sisi lain penulis melihat bahwa proses penggabungan Kelurahan sangat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dengan beberapa temuan faktor dan indikator. Pada prinsipnya penggabungan Kelurahan bertujuan untuk menata kembali Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata kunci: Penggabungan Kelurahan, Efektifitas, Pelayanan Publik

MERGING OF URBAN VILLAGES IN THE REGION OF PAYAKUMBUH CITY IN ORDER TO EFFECTIVENESS OF THE PUBLIC SERVICES

**Romario Putra, BP : 1620112010, Law Legal Science Study Program
Faculty of Law Andalas University. 142 Pages, 2020**

1st Supervisor Dr. Yuslim, S.H.,M.H., 2ndSupervirsor Dr. Khairani, SH., M.H.

ABSTRACT

The implementation of structuring urban villages as stated in Article 5 paragraphs (1) and (2) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 31 of 2006 about Formation, Deletion and Merger of the Urban Villages has determined the minimum requirements of urban villages formation such as population, area, access and supporting facilities for government. Payakumbuh government with a number of 76 urban villages are considered too many and not proportional, so that it is not optimal in carrying out governments affair at urban villages level, but on the one hand Payakumbuh government in implementing the arrangement of the urban villages has not fully met the stipulated provisions as stated in that Regulation and based on Article 7 paragraph (2) that Deletion and Merger of urban villages is based on the results of research and studies which carried out by the Regency / City Government, so that Payakumbuh City Regulation Number 7 of 2013 concerning Formation, Merger and Elimination of urban villages in Payakumbuh City has been published, where the formation of the urban villages is determined through a study set forth in the form of a scoring system. The purpose of this research is to analyse about how the implementation of the merger urban villages in the Payakumbuh city based on applicable laws and regulations and how the impact of merging the urban villages with the public services effectiveness later. This type of research is descriptive with the method of sociological juridical approach. The research data consisted of primary and secondary data which collected through interview techniques, questionnaires and document studies which were processed using editing techniques and analysed qualitatively. The formation of urban villages in Payakumbuh through scoring system resulted in 20 new urban villages which is the resulted of studies and policies of Payakumbuh government with relevant stakeholders. Normatively, 20 new urban villages were found thath there were a number of urban villages that did not meet the requirements as stipulated in Permendagri Number 31 of 2006 such as the population that is still below 2000 inhabitants and the area which is still under 5 Km², other than that the process of merging will be seen from the perspective of the latest legislation. On the other hand the authors see the process of merging the urban villages is very positive on the quality of community services with several findings of factors and indicators. In principle, merging urban villages aims to restructure the existing urban village in the City of Payakumbuh which adapted to the capabilities of existing resources and aims to improve the effectiveness of the quality of public service organization.

Key words : *Merging Urban Villages, Effectiveness, Public Service.*